



BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF

**ARIESANI HERMAWANTO
SRI MURYANTINI**

**LPPM UPNVY PRESS
2021**

BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF

**ARIESANI HERMAWANTO
SRI MURYANTINI**

ISBN 978-623-5539-75-1



**LPPM UPN VY PRESS
2021**

Judul Buku
Bela Negara Dalam Perspektif

Penulis:

Ariesani Hermawanto

&

Sri Muryantini

ISBN 978623553951

Cetakan Pertama, 2021

Ukuran 16,5 cm x 23,75 cm

120 + vi hlm

Desain Sampul:

Ivan G. Muhammad

Desain Isi:

Ivan G. Muhammad

Diterbitkan oleh:

LPPM Press

UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta

Telepon (0274) 486733, ext 154

Fax (0274) 486400

Yogyakarta

ISBN 978-623-5539-75-1



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya penulisan buku ini yang berjudul Bela Negara Dalam Perspektif

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan, namun harapan kami bahwa buku ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, kritik dan saran yang membangun dari pembaca kami harapkan agar dapat berguna bagi penulis kedepannya untuk terus menyempurnakan tulisan kami

Yogyakarta, 10 Oktober 2021
Tim Penyusun

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Judul Depan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I	Eksistensi manusia dan rasa memiliki
A.	Manusia dan eksistensinya..... 4
B.	Dimensi kehidupan manusia..... 9
C.	Kehidupan di bawah negara..... 29
D.	Bela Negara Sebagai Awareness38
BAB II	Masalah-masalah negara-bangsa..... 39
A.	Bela negara dan nasionalisme 40
B.	Nasionalisme, Negara dan Bnagsa..... 45
C.	Perdebatan Tentang Nasionalisme..... 63
BAB III	Bela Negara Perspektif Integrasi..... 76
A.	Bela Negara dan Integrasi..... 76
B.	Integrasi Politik..... 77

BAB I

EKSISTENSI MANUSIA DAN RASA MEMILIKI (*Sense of belonging*)

Bela negara merupakan perwujudan dari rasa memiliki (*sense of belonging*) warganegara yang merupakan aspek sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Dalam tinjauan dari warganegara ini perlu dijelaskan esensi mendasar dari kehidupan manusia dalam sebuah negara. Ruang lingkup keberadaan manusia ada dalam tiga dimensi, **pertama** yaitu manusia sebagai makhluk individual, **kedua** sebagai makhluk sosial dan **ketiga** sebagai makhluk lingkungan. Manusia secara individual adalah pribadi yang mempunyai kekhususan; baik dalam hal pemikiran, perasaan, cara pandang serta membuat pilihan-pilihan secara personal. Tinjauan dari personalitas itu

menunjukkan bahwa manusia adalah unik karena mempunyai perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya.

Kesadaran bela negara itu dasarnya adalah kesediaan mewujudkan kesetiaan kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Usaha pembelaan negara bertumpu ada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian tumbuh melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam membela negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami karakteristik-karakteristik yang menjadi keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga negara mesti memahami kemungkinan segala ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negaranya. Kesadaran bela negara ditanamkan kepada warga negara, dimana ini merupakan proses yang perlu diketahui tahap-tahapannya sebagai sebuah studi sejarah dan sosial sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini.

MANUSIA DAN EKSISTENSINYA

Keberadaan manusia di bumi telah melampaui masa yang panjang. Dalam rentang sejarah yang penuh dengan dinamika kehidupan, manusia banyak belajar mengenai eksistensinya. Manusia modern yang menghuni bumi hingga saat ini disebut sebagai homo sapiens yang bermakna sebagai makhluk yang berpikir. Manusia modern diperkirakan muncul sejak 70 ribu tahun lalu di Afrika dan mulai 15 ribu tahun lalu mereka telah menyebar ke banyak wilayah di planet bumi hingga sekarang.

Apa yang menyebabkan manusia mampu mempertahankan keberadaannya bahkan menjadi satu-satunya ras manusia yang masih bertahan hingga sekarang? Apakah karena fisiknya? Ternyata bukan. Justru kalau ditinjau secara fisik manusia modern adalah lebih lemah dibanding generasi ras manusia sebelumnya yaitu homo Neanderthal. Kemampuan bertahan homo sapiens bukanlah terletak pada kekuatan tubuhnya yang besar ataupun juga sistem pencernaan yang lebih efisien; atau segala hal yang lebih bersifat fisik. Keunggulan manusia modern terletak pada kekuatan pikirannya; sebuah kemampuan yang tidak dimiliki ras manusia sebelumnya

(Coolidge & Wynn : 2009: 2). Kemampuan tersebut berkaitan dengan kecerdasan (*intelligence*) dan juga pengetahuan (*knowledge*) yang dihasilkannya (Aslaksen: 2018: 42)

Pikiran manusia membuat mereka mampu merumuskan siapa diri mereka sebagai individu maupun sebagai kumpulan individu. Pikiran menghasilkan sebuah kesadaran (*consciousness*) tentang jati diri. Di dalam perkembangannya, kesadaran jati diri ini terus berkembang menjadi kesadaran identitas kolektif; tentang bagaimana mengatur kehidupan bersama, bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka serta yang sangat penting adalah mengatasi segala bentuk ancaman dan gangguan yang dihadapi. Identitas kolektif mengacu pada rasa memiliki seseorang terhadap suatu kelompok. Identitas kelompok, atau 'kolektif', menjadi bagian dari identitas individu seseorang. Idenya di sini adalah bahwa dengan berpartisipasi dalam aktivitas sosial, seseorang dapat mengembangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan identitas yang melampaui identitas orang itu sendiri secara individual. Bagi para sarjana gerakan sosial, salah satu konsep terpenting yang diperlukan untuk memahami subjek studi mereka adalah identitas kolektif.

Istilah identitas kolektif ini didefinisikan dalam berbagai cara antara lain (Elliot :2011:366):

1. Sebagai 'proses dimana aktor sosial mengenali diri mereka sendiri, dan diakui oleh aktor lain, sebagai bagian dari pengelompokan yang lebih luas dan mengembangkan keterikatan emosional pada mereka' .
2. Sebagai sesuatu kondisi yang dibentuk oleh rasa bersama dan interaktif tentang "kebersamaan" dan "agen kolektif".
3. Sebagai sebuah pemahaman tentang identitas kolektif yang dimaknai sebagai proses, yaitu istilah interaksional, dimana fokusnya pada 'kerja identitas' dan mekanisme melalui negosiasi bersama-sama dan merekonstruksi sebuah perasaan diri mereka sendiri.

Keterikatan yang terjadi diantara manusia menjadi semakin kuat dan terpupuk seiring semakin intensnya interaksi diantara mereka serta kondisi saling membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan hidup bersama. Selanjutnya muncul solidaritas sosial satu sama lain. Emile Durkheim (1984:24) menunjukkan bahwa adanya solidaritas, seringnya

interaksi, serta adanya peluang saling bekerjasama akan menghasilkan tarik-menarik (*attract*) diantara orang secara timbal balik. Terdapat tiga konvergensi besar mengenai tiga elemen utama yang menjadi kunci dalam pembentukan identitas kolektif (Elliot :2011:366) yaitu:

1. Pertama adalah rasa solidaritas, yaitu rasa kedekatan dan komitmen kepada orang lain dalam perjuangan politik bersama. Dengan kata lain, identitas kolektif melibatkan konstruksi kolektivitas yang disengaja untuk tujuan politik.
2. Kedua berkaitan dengan agensi, yaitu menekankan pada identitas kolektif yang memungkinkan adanya tindakan kolektif bahwa perasaan tentang siapa kita dihasilkan melalui tindakan bersama.
3. Ketiga adalah emosi, yaitu identitas kolektif yang dipahami sebagai 'hubungan emosional dengan komunitas yang lebih luas'; yang merupakan investasi emosional dan membantu menopang secara emosional pula.

Identitas kolektif ini dapat dibedakan dari jenis identitas lain, seperti misalnya identitas sosial, yaitu sebuah istilah yang digunakan secara luas dalam sosiologi untuk menunjukkan identitas yang didasarkan pada peran sosial yang mapan, atau dalam kategori sosial yang lebih luas dan lebih inklusif seperti kategori gender atau kategori etnis dan nasional. Identitas sosial seringkali berfungsi hanya untuk memberikan 'penanda orientasional' dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan identitas kolektif dapat diadopsi oleh individu sebagai 'bagian yang menonjol dari identitas pribadi dan rasa (*sense*) diri mereka', serta perhatian analitis yang cukup besar telah diberikan pada 'konvergensi' atau 'korespondensi' dari proses identifikasi pribadi dan kolektif (Elliot :2011:367).

DIMENSI KEHIDUPAN MANUSIA

Manusia merupakan makhluk hidup yang bisa ditinjau dari 3 dimensi, **pertama** yaitu manusia sebagai makhluk individual, **kedua** sebagai makhluk sosial sosial dan **ketiga** sebagai makhluk lingkungan. Secara individual manusia adalah pribadi yang mempunyai kekhususan; baik dalam hal pemikiran, perasaan, cara pandang, membuat pilihan-pilihan secara personal dsb. Tinjauan dari personalitas demikian menunjukkan bahwa manusia adalah unik karena mempunyai perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Terdapat kondisi yang esensial berkaitan dengan kepribadian manusia yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kemampuan kognitif dalam pengertian yang luas, yaitu mempunyai pemikiran, tujuan dan arah, rasionalitas serta bahasa.
2. Kesadaran diri (*self consciousness*) dan evaluasi diri secara kritis
3. Kebebasan dan otonomi

Sedangkan secara umum dalam sifatnya (*traits*) individu mempunyai potensi, bakat dan kekuatan yang bersifat positif

seperti keberanian (*courage*), keingintahuan (*curiosity*), kebijaksanaan (*wisdom*), kebaikan (*kindness*) dan kesabaran (*patience*) (Henry : 2007 :29). Keberanian yang dimiliki oleh manusia menyebabkan dia siap menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Berani ini bisa dimanifestasikan dalam banyak bentuk seperti berani bertindak, berani bertanggung jawab, berani melindungi diri, berani berinisiatif hingga berani menjaga dan mengamankan eksistensi dirinya. Keberanian merupakan sumber utama semangat dan perjuangan dalam menjalani kehidupan. Keingintahuan mendasari diri seseorang untuk mau berkembang. Termasuk disini adalah mencari tahu arah kehidupan yang perlu dibentuk dan dibangun demi kesejahteraan diri. Kebijaksanaan adalah landasan falsafah yang penting artinya dalam menjalani kehidupan. Manusia adalah makhluk yang mempunyai budi, yang mempunyai jiwa untuk mencapai tujuan-tujuan ideal yaitu manusia yang beradab. Kebaikan menjadi sasaran dan tujuan dalam menjalani hidup, termasuk membangun nilai-nilai, norma dan juga standar dalam hidup. Serta kesabaran yang meneguhkan manusia untuk selalu siap dalam menjalani proses. Tiada hasil tanpa melalui proses,

karena hasil adalah konsekuensi logis dari proses. Oleh itu kesabaran menjadi satu kunci utama.

Sedangkan dalam dalam konteks sebagai makhluk sosial, individu-individu menyadari bahwa mereka secara eksklusif tidak bisa hidup sendiri. Manusia bukanlah makhluk yang solitaire yang bisa hidup sendiri, sebagaimana jenis binatang tertentu. Manusia adalah makhluk yang berkecenderungan untuk berkumpul, dimana mereka bisa menemukan arti diri mereka secara kolektif. Manusia itu perlu interaksi dengan manusia yang lain, termasuk adanya pengakuan eksistensinya satu sama lain dalam sebuah entitas bersama. Proses ini yang selanjutnya menghasilkan sebuah komunitas yang mempunyai (mengklaim) identitas kolektif (*collective identity*). Komunitas ini kemudian dikenali sebagai masyarakat. Menurut McAuley (2003:4), istilah masyarakat (*society*) itu merujuk pada dua hal yang utama. **Pertama**, dan yang paling luas, masyarakat adalah keseluruhan dari interaksi manusia. Ini merupakan sistem hubungan timbal balik dan struktur yang menghubungkan individu-individu. Yang **kedua**, dalam makna yang lebih sempit, masyarakat adalah sebuah pengelompokan orang yang memiliki

lembaga dan budaya yang khas dan dapat diidentifikasi. Masyarakat merupakan sistem sosial yang dapat dibedakan melalui identifikasi terhadap karakteristik politik, budaya dan struktural. Termasuk juga adalah sekelompok orang (*people*) yang tinggal dalam teritorial yang jelas batasnya, menjadi subjek dalam sistem otoritas politik.

Sistem sosial, menurut Charles P. Loomis (1960) adalah interaksi terpola dari para aktor visual yang hubungannya satu sama lain berorientasi secara mutual melalui pola mediasi yang terstruktur, serta saling berbagi simbol dan harapan bersama. Oleh karena itu, semua organisasi sosial adalah 'sistem sosial', karena mereka terdiri dari individu-individu yang berinteraksi. Dalam sistem sosial, setiap individu yang berinteraksi memiliki fungsi atau peran yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan status yang didudukinya dalam sistem tersebut. Suatu sistem sosial mengandaikan suatu struktur sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, yang saling terkait sedemikian rupa untuk menjalankan fungsinya. Sistem sosial adalah pengaturan yang menyeluruh, yang berkaitan dengan semua subsistem yang beragam seperti ekonomi, politik, agama dan

sebagainya. Sistem sosial terikat oleh lingkungan seperti geografi yang membedakannya dari sistem yang lain.

Disebutkan pula oleh Loomis (1960) yang menjadi unsur-unsur dari sistem sosial yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan Pengetahuan: Keyakinan dan pengetahuan membawa keseragaman dalam perilaku. Mereka bertindak sebagai agen pengendali berbagai jenis masyarakat manusia. Keyakinan adalah hasil dari adat dan kepercayaan yang berlaku. Mereka menikmati kekuatan individu yang dibimbing menuju arah tertentu.
2. Sentimen: Manusia tidak hidup dengan akal semata-mata namun juga mempunyai perasaan termasuk di dalam bertindak sesuai dengan perasaannya. Ini bentuk dari sentimen baik secara sosial maupun nasional; serta telah memainkan peran besar dalam menginvestasikan masyarakat dengan kontinuitas. Hal ini terkait langsung dengan budaya masyarakat.

3. Tujuan akhir atau objek: Manusia dilahirkan secara sosial dan dalam posisi saling ketergantungan. Dia harus memenuhi persyaratannya dan memenuhi kewajibannya. Manusia dan masyarakat berada di antara kebutuhan, kepuasan serta tujuan-tujuan. Ini menentukan sifat sistem sosial yang menyediakan jalur bagi kemajuan.
4. Cita-cita dan norma: Masyarakat menetapkan norma-norma dan cita-cita tertentu untuk menjaga sistem sosial tetap utuh dan untuk menentukan berbagai fungsi unit yang berbeda. Norma-norma ini menetapkan aturan serta peraturan atas dasar mana individu atau orang dapat memperoleh tujuan dan sasaran budaya mereka. Cita-cita dan norma berkaitan dengan tanggung jawab atas struktur maupun sistem yang ideal dari masyarakat. Dengan demikian perilaku manusia tidak menyimpang dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini mengarah pada organisasi dan stabilitas. Norma-norma dan cita-cita tersebut meliputi

adat istiadat, tradisi, mode, moralitas, agama, dan lain-lain.

5. Status-peran: setiap individu dalam masyarakat adalah bersifat fungsional. Individu berada dalam konteks hubungan status-peran berdasarkan kelahiran, jenis kelamin, kasta, ataupun usianya. Seseorang dapat mencapainya berdasarkan layanan yang diberikan.
6. Peran: Sebagaimana halnya status, masyarakat telah menetapkan peran yang berbeda untuk individu yang berbeda. Boleh jadi terdapat peran yang melekat pada setiap status. Peran adalah ekspresi eksternal dari status. Saat melaksanakan kegiatan atau melakukan hal-hal tertentu, setiap individu perlu mengingat statusnya. Hal ini mengarah pada integrasi sosial, organisasi dan kesatuan dalam sistem sosial. Status dan peran berjalan bersama serta tidak mungkin memisahkan mereka sepenuhnya satu sama lain.
7. Kekuasaann: Konflik adalah bagian dari sistem sosial dimana ketertiban adalah tujuannya. Oleh karena itu

perlu adanya kekuasaan untuk menghukum yang bersalah dan memberi penghargaan kepada mereka yang memberi contoh ketertiban. Otoritas yang menjalankan kekuasaan akan berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya; dan dalam konteks negara itu adalah pemerintah.

8. Sanksi: Ini menggambarkan konfirmasi oleh atasan yang mempunyai otoritas, atas tindakan yang melanggar perintah. Perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan menurut norma dapat mendatangkan ganjaran dan hukuman.

Sedangkan yang menjadi ciri-ciri dari sistem sosial menurut Loomis (1960) adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang terhubung dengan pluralitas dari aktor individu: Artinya suatu sistem atau sistem sosial tidak dapat dipikul sebagai akibat dari aktivitas satu individu saja. Ini adalah hasil dari aktivitas berbagai individu; yang menunjukkan bahwa dalam sistem sosial, interaksi beberapa individu haruslah eksis.

2. Tujuan dan objek: Interaksi manusia atau aktivitas aktor individu tidak boleh tanpa tujuan atau tanpa objek. Kegiatan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan objek tertentu. Ekspresi hubungan sosial yang berbeda lahir sebagai hasil dari interaksi antar manusia.
3. Tatanan dan pola di antara berbagai unit konstituen: Berkumpulnya berbagai unit penyusun dari sistem sosial tidak serta merta menciptakan sistem sosial. Itu harus sesuai dengan pola, pengaturan dan urutan. Selanjutnya, kesatuan di antara berbagai unit konstituen menghasilkan 'sistem sosial'.
4. Hubungan fungsional adalah dasar kesatuan: Unit-unit penyusun yang berbeda memiliki satu kesatuan untuk membentuk suatu sistem. Kesatuan ini didasarkan pada hubungan fungsional. Sebagai hasil dari hubungan fungsional diantara unit-unit konstituen yang berbeda, maka tercipta suatu kesatuan yang utuh dan ini dikenal sebagai sistem sosial.

5. Aspek fisik atau lingkungan sistem sosial: ini bermakna bahwa setiap sistem sosial terkait dengan wilayah geografis atau tempat, waktu, dan juga masyarakat tertentu. Dengan kata lain, sistem sosial tidak sama pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dalam keadaan yang berbeda. Karakteristik sistem sosial ini menunjukkan adanya sifat yang dinamis atau berubah-ubah.
6. Terkait dengan sistem budaya: Sistem sosial terkait dengan sistem Budaya, yang berarti bahwa sistem budaya membawa persatuan di antara anggota masyarakat yang berbeda berdasarkan budaya, tradisi, agama, dan sebagainya.
7. Maksud dan tujuan baik yang tersurat maupun tersirat: Sistem sosial berkaitan dengan tujuan yang tersurat dan tersirat. Dengan kata lain, itu berarti bahwa sistem sosial adalah berkumpulnya aktor-aktor individu yang berbeda yang dimotivasi oleh maksud dan tujuan mereka dan kebutuhan mereka.

8. Karakteristik penyesuaian: Sistem sosial memiliki ciri penyesuaian yang merupakan fenomena dinamis serta dipengaruhi oleh perubahan- perubahan yang ditimbulkan dalam bentuk sosial. Dalam hal ini sistem sosial dipengaruhi oleh tujuan, objek, dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa sistem sosial hanya akan relevan jika ia mengubah dirinya sendiri sesuai dengan objek dan kebutuhan yang berubah. Dalam konteks ini perubahan terjadi dalam sistem sosial karena kebutuhan manusia, lingkungan, kondisi dan fenomena sejarah.
9. Urutan, pola dan keseimbangan: sistem sosial memiliki ciri-ciri pola, keteraturan dan keseimbangan. Sistem sosial bukanlah suatu kesatuan yang utuh tetapi merupakan kesatuan dari unit-unit yang berbeda. Kebersamaan ini tidak terjadi secara acak dan serampangan. Ada aturan dan tatanan keseimbangan. Hal ini terjadi karena unit-unit masyarakat yang berbeda tidak bekerja sebagai unit yang berdiri sendiri, bukan pula berada dalam ruang

hampa tetapi dalam pola sosial budaya. Dalam pola unit yang berbeda akan memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Artinya terdapat pola dan keteraturan dalam sistem sosial.

Satu hal penting selanjutnya adalah kaitan antara identitas dengan tingkah laku manusia. Dalam konteks seperti ini proses yang kemudian terjadi adalah tumbuhnya apa yang disebut sebagai “perasaan memiliki” atau “*sense of belonging*”. Rasa memiliki adalah perasaan psikologis dari memiliki sesuatu atau keterhubungan dengan suatu kelompok atau komunitas sosial, spasial, budaya, profesional, ataupun lainnya. Keyakinan atau cita-cita bersama, lingkungan yang mendukung, harga diri, dan kesempatan untuk berinteraksi dapat mempengaruhi perkembangan rasa memiliki pada individu. Ini adalah pengalaman keterlibatan pribadi dalam suatu sistem atau lingkungan sehingga orang merasa dirinya menjadi bagian integral dari sistem lingkungan. Rasa memiliki dan identifikasi ini melibatkan perasaan, kepercayaan, dan harapan bahwa seseorang sesuai dalam kelompok dan memiliki tempat di sana, perasaan diterima oleh kelompok, serta kesediaan untuk

berkorban bagi kelompok. Ini dapat dimaknai sebagai perasaan sebuah kesatuan kumpulan individu, yaitu masyarakat, yang mengklaim sebuah identitas bersama, dan di bagian lain, kesatuan dengan tempat dimana mereka hidup. Pengertian tentang identitas disini menyangkut identitas secara personal, yaitu berkaitan dengan gambaran tingkat laku yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya; serta identitas secara sosial atau budaya, yaitu kumpulan dari peran sosial yang dapat dimainkan oleh seseorang (Aslaksen: 2018: 56).

Sedangkan sebagai makhluk lingkungan, manusia itu terikat dengan alam dan lingkungan dimana manusia tinggal dan hidup. Hal ini karena kehidupan bersama itu tidak bisa lepas dari wilayah yang menjadi tempat huni mereka, baik yang sifatnya sementara ataupun permanen. Kumpulan individu itu menjadi sebuah komunitas yang terikat dengan lingkungan mereka; bukan hanya saat mereka menjadi penghuni tetap sebuah tempat, bahkan ketika komunitas itu masih bersifat nomaden sekalipun. Lingkungan sangat penting artinya, di sanalah manusia itu membentuk komunitas, sebagai wadah ruang dimana manusia-manusia itu dapat bertemu dan berkumpul. Di

dalam lingkungan juga manusia itu dapat mencari sarana-sarana untuk mendukung kehidupan mereka, baik dalam hal pangan, sandang, tempat tinggal maupun yang lainnya. Lingkungan menjadi ruang hidup bagi manusia, menjadi sebuah sarana dihasilkannya sebuah identitas tertentu yang formal maupun non-formal.

Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Secara sederhana lingkungan itu berkaitan dengan tanah dimana manusia itu bisa berpijak disitu, air dimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya karena air adalah sangat vital bagi sarana menghasilkan pangan bagi kehidupan, dan udara karena manusia setiap saat perlu bernafas. Lingkungan dalam konteks tanah, air dan udara ini menunjukkan secara sederhana bahwa lingkungan adalah bersifat krusial di dalam menentukan kehidupan manusia. Lingkungan yang mampu mendukung kelangsungan hidup manusia akan menjadi lingkungan yang sinergis dan secara mutual berdampak konstruktif, dalam arti kualitas hidup manusia pun tinggi. Di bagian lain, ketika lingkungan itu dalam kondisi yang buruk, juga dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kualitas

kehidupan manusia yang hidup di dalamnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa keberadaan lingkungan perlu dijaga dari segala hal yang dapat merusakkannya. Dalam konteks yang lebih fundamental, manusia yang hidup di dalam ruang lingkungan tertentu harus menjaga dari kehilangan kepemilikan atas lingkungan tersebut. Kehilangan ini akan menyebabkan manusia yang tinggal di dalamnya terdegradasi secara serius dari dalam dan bahkan mereka bisa kehilangan eksistensinya.

Lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan ditinjau dari ruang lingkungannya. Pertama adalah lingkungan yang paling kecil. Lingkungan yang paling kecil ini adalah lingkungan keluarga, yaitu ruang hidup yang dihuni oleh sebuah keluarga tertentu. Sebagai bentuk dari lingkup yang paling kecil, lingkungan keluarga ini memainkan peranan penting menghasilkan kualitas manusia- manusia yang tinggal di dalamnya. Di dalam lingkungan keluarga inilah manusia memulai peran dan fungsinya sebagai makhluk individu, sosial dan sekaligus makhluk lingkungan.

Bagaimana agar manusia yang tinggal di dalam sebuah lingkungan keluarga itu mempunyai **kesetiaan** terhadap

keluarganya sendiri ? Salah satu yang mendasar adalah, manusia atau individu tersebut harus mempunyai rasa memiliki atau “sense of belonging”. Adanya rasa memiliki akan memperkuat keterikatan dan soliditas di dalam keluarga tersebut, dan sekaligus akan mengamankan lingkungan keluarga tersebut jika terjadi potensi ancaman bahkan gangguan secara langsung. Adanya rasa memiliki akan membuat individu di dalamnya siap “membela” keluarga tersebut baik penghuninya maupun ruang hunian di mana keluarga tersebut tinggal. Sebuah keluarga itu memerlukan nama baik, yang menggambarkan harga diri keluarga tersebut. Secara umum, nama baik itu tidak datang secara tiba-tiba ataupun eksis dengan sendirinya. Nama baik itu perlu diciptakan, dibangun dan dilestarikan. Upaya menciptakan nama baik sebuah keluarga itu adalah bagian dari membela harga diri keluarga tersebut. Saat individu-individu didalam sebuah keluarga mempunyai moral yang baik, ada reputasi berbudi pekerti yang luhur, maka ini adalah membela harga diri dan citra keluarga; sebuah pembelaan yang tidak kalah pentingnya dengan pembelaan secara fisik. Di bagian lain, ancaman terhadap lingkungan keluarga jelas merupakan hal

yang sangat krusial. Keluarga itu hidup dan menjalankan aturan tertentu di wilayah yang mereka huni. Ketika membicarakan potensi ancaman dan atau gangguan secara langsung, apakah selalu bersifat fisik? Tentu saja tidak. Potensi ancaman atau gangguan itu tidak selalu bersifat fisik, namun juga bersifat non-fisik seperti, misalnya, ancaman rusaknya komitmen persatuan di dalam keluarga tersebut. Saat ada ancaman yang bisa merusakkan soliditas sebuah keluarga, termasuk lingkungan wilayahnya, maka diperlukan usaha pembelaan terhadapnya. Pembelaan ini kadangkala memerlukan tindakan secara fisik. Sebagai gambaran misalnya, ketika ada orang asing yang mengganggu ketentraman sebuah keluarga, maka diperlukan kekuatan untuk bisa mengatasi gangguan orang asing tersebut.

Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Secara umum lingkungan masyarakat ini tersusun atas kumpulan lingkungan keluarga-keluarga; sehingga bisa dikatakan bahwa lingkungan masyarakat adalah sebuah “keluarga besar” yang menampung banyak orang. Karena jumlah anggota dari lingkungan masyarakat ini lebih besar, menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan masyarakat ini

juga semakin kompleks. Aturan-aturan yang dijalankan agar sebuah lingkungan masyarakat itu kuat, dan penghuninya saling bisa bersinergi juga lebih banyak. Ikatan-ikatan yang dibangun dalam sebuah masyarakat adalah lebih banyak dan multi dimensi. Lalu bagaimana caranya agar penghuni lingkungan masyarakat itu mempunyai **kesetiaan** terhadap masyarakatnya? Sama dalam konteks lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat pun warga yang menghuni di dalamnya harus mempunyai “*sense of belonging*”. Adanya perasaan memiliki ini akan menumbuhkan upaya warga sebuah lingkungan masyarakat untuk menjaga martabat serta citra bersama. Upaya yang seperti ini merupakan bagian dari pembelaan terhadap lingkungan masyarakat tersebut dari potensi hinaan atau looking-down dari masyarakat lain. Dalam konteks wilayah, sama halnya dengan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatpun memerlukan pembelaan agar masyarakat tersebut eksis. Pembelaan ini secara fisik ini sangat diperlukan saat sebuah masyarakat itu menghadapi potensi ancaman atau gangguan dari dalam masyarakat itu sendiri maupun pihak luar.

Lingkungan yang ketiga adalah negara. Lingkungan dalam konteks negara ini merupakan lingkungan yang tersusun atas kedua jenis lingkungan yang ada sebelumnya, yakni lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini merupakan bentuk lingkungan yang luas dan semakin kompleks. Dalam konteks lingkungan negara ini aturan-aturan yang mengikat keluarga dan juga masyarakat dijalankan agar sinergi terjadi dalam bentuknya yang paling kuat. Bagaimana agar kesetiaan dan sinergi dalam rangka kerjasama kerjasama dapat terjalin dengan baik? Ini memerlukan faktor yang sama pula dengan dua jenis lingkungan sebelumnya yaitu harus adanya *sense of belonging* terhadap lingkungan di tingkat negara tersebut. Rasa memiliki akan mempengaruhi warga dari negara tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup bernegara dan sekaligus menjaga eksistensinya. Inilah yang selanjutnya diberi label sebagai bela negara. Bagaimana selanjutnya menerjemahkan bela negara ini? Ini dapat diterjemahkan bahwa segala sesuatu upaya yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup bernegara dan menjaga keberadaannya adalah bentuk dari bela negara. Dengan demikian bela negara bukan semata-mata bersifat fisik

namun juga non fisik. Sebagai gambaran misalnya, upaya meningkatkan harga diri bangsa dengan membangun nama baik adalah bagian dari bela negara. Upaya untuk mempertahankan negara dari segala sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan bela negara. Dalam pemahaman seperti ini, maka bela negara mempunyai dimensi yang sangat luas, dan bukan terbatas pada unsur-unsur yang sifatnya fisik misalnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang dimanifestasikan sebagai kekuatan militer maupun persenjataan.

Lingkungan yang keempat adalah lingkungan dunia internasional. Di dalam lingkungan ini unsur-unsur pembentuknya adalah negara-negara yang ada di seluruh dunia, dimana mereka satu sama lain mempunyai kedaulatannya sendiri. Di dalam tulisan ini ditekankan dalam konteks lingkungan sampai tingkat negara, dengan fokus pada konsep bela negara; meskipun dalam bagian tertentu akan membahas pula mengenai lingkungan internasional.

KEHIDUPAN DI BAWAH NEGARA

Kehidupan di bawah sistem masyarakat telah melewati fase yang berbeda beda. Dari masyarakat yang tradisional hingga masyarakat yang lebih terstruktur secara jelas bagaimana masyarakat itu diatur. Ini berlangsung dalam kondisi legal dan formal dengan ruang lingkup yang jelas dimana aturan legal formal itu berlaku. Ada satu syarat penting dimana sebuah masyarakat itu mengakui bagaimana mereka berhak tinggal, diakui keabsahannya untuk menghuni tempat tersebut, serta secara bersama-sama membangun sinergi dalam interaksi diantara mereka. Dalam konteks ini, apa yang kemudian menjadi batas dari ruang lingkup dimana masyarakat tinggal dan dijalankannya sejumlah pengaturan kehidupan? Batas itu yang disebut sebagai negara.

Negara merupakan satu konsep penting ketika membicarakan mengenai masyarakat dalam sebuah wilayah secara keseluruhan. Bukan sesuatu yang mudah ketika mendefinisikan negara, sebab ada banyak terdapat arti dan juga definisi mengenai 'negara' tersebut, termasuk juga ide-ide yang mendasari terbentuknya sebuah negara. Apakah yang dimaksud

dengan 'negara' (*state*) ? Negara bisa diibaratkan sebagai wadah yang didalamnya terdapat berbagai macam unsur yang mengisi wadah tersebut. Dengan demikian negara merujuk kepada objek yang bersifat fisik seperti wilayah, garis batas wilayah. Negara disini bermakna sebuah teritorial. Termasuk juga negara merujuk kepada karakter simbolik dan legal sebagai sebuah kekuasaan yang berdaulat. Di bagian lain negara berkaitan dengan mekanisme bagaimana unsur-unsur yang ada didalamnya diatur, sehingga negara berkaitan dengan pemerintahan yang dijalankan di negara tersebut, termasuk misalnya birokrasi, kementerian, militer, polisi, partai politik, parlemen dan sebagainya. Mendefinisikan negara berdasarkan salah satu tinjauan saja seperti kelembagaan, kadaulatan ataupun teritorial semata-mata akan menjadi tidak tepat (*mistake*) (Opello, Jr & Rosow: 1999 : 4).

Meninjau negara dari sudut pandang kesejarahan adalah perlu untuk lebih memahami apa yang dimaksud negara seperti dalam konteks masa kini. Mengapa mengambil sebuah pendekatan sejarah untuk mengerti apa yang dimaksud dengan sebuah negara? Hal ini karena sejarah adalah penting karena

dengan menguji keberadaan sebuah negara di dalam perspektif sejarah maka dapat ditunjukkan bahwa yang disebut negara itu bukan sesuatu yang universal ataupun *given*. Bukan pula sesuatu yang melekat secara alamiah dari kehidupan manusia. Sebuah sejarah dari negara menggambarkan bahwa negara itu diciptakan oleh tindakan-tindakan dari masyarakat di dalam pembatasan-pembatasan mengenai struktur, ataupun juga pengertian yang dikaitkan dengan tempat dan juga waktu. Negara merupakan sebuah efek ataupun dampak dari bagaimana rakyat itu hidup. Sebuah pendekatan sejarah menggambarkan, sebagai contoh, bahwa kedaulatan (*sovereignty*) meskipun merupakan sebuah komponen yang sangat krusial dari negara, namun kedaulatan itu tidak identik dengan negara (*state*). Kedaulatan adalah terlembaga seperti disampaikan Thomas Hobbes, tidak oleh negara sebagaimana negara itu eksis. Akan tetapi yang namanya kedaulatan itu bagian dari perkembangan negara. Bagaimanapun juga kekhususan sejarah mengenai kedaulatan, bagaimana ia dibentuk, dilembagakan, dan juga direproduksi di dalam waktu-waktu yang penting dan juga tempat-tempat yang penting adalah

sesuatu yang signifikan di dalam menilai apa yang dimaksud dengan negara. Kemudian keuntungan lain dari meninjau negara dengan pendekatan sejarah adalah, **pertama**, bahwa konstruksi sosial yang muncul yang menjadi bersifat universal pasti atau *fixed / given* sebagaimana perbedaan diantara *state* dan *society*, hubungan diantara politik domestik (*inside*) dan juga politik internasional (*outside*), koneksi atau hubungan antar lembaga dengan ideologi serta pemisahan antara yang bersifat publik ataupun private dapat ditunjukkan dengan meninjau pada terciptanya negara dalam konteks historis. **Kedua**, termasuk juga disini adalah formasi mengenai kedaulatan, hanya dipahami sebagai bagian luar dari teori negara, seperti halnya -misalnya- adalah hubungan internasional dan juga teori feminis. **Ketiga**, tinjauan secara sejarah akan memungkinkan atau mengijinkan pengujian mengenai *mutual embeddedness* ataupun juga kaitan yang sifatnya mutual dalam konteks ekonomi, agama, tradisi sehari-hari; tanpa negara itu kemudian hanya berfokus pada salah satu hal tersebut.

Tinjauan kesejarahan itu juga menunjukkan bahwa kedaulatan ataupun juga teritorial dari negara bangsa (*nation-*

state) itu secara fundamental berbeda dengan praktek-praktek pemerintahan dari era negara kota (*city states*) di era Yunani, ataupun juga negara imperium tradisional pada masa lalu. Negara kota yang ada di Yunani itu secara teritorial adalah kecil, kemudian juga secara independen merupakan wilayah urban yang membentuk sebuah entitas politik yang otonom. Ini menggambarkan dirinya sendiri dimana negara kota itu merupakan sebuah praktek pemerintahan yang secara intensif itu logis dalam konteks tempat. Negara kota merupakan representasi dari kekuasaan dan juga otoritas yang terwujud dalam sebuah tempat. Sebagai contoh adalah negara kota di Yunani Kuno (Sparta, Athena), juga negara kota yang sekarang terletak di Jerman Utara misalnya Bremen, Hamburg; termasuk negara kota republik yang sekarang ada di Italia Utara seperti Venesia, Genoa, Pisa dan sebagainya di dalam era Renaissance. Negara kota yang eksis pada sekarang itu bisa dicontohkan adalah Singapura, yang hanya menempati wilayah 641 kilometer persegi, yang lebih kecil dari kota New York di Amerika Serikat.

Kemudian negara-bangsa (*nation-state*) modern ini juga berbeda dengan negara imperium tradisional. Di dalam imperium

ini terdapat satu pemerintahan pusat dari imperium tradisional, misalnya imperium Romawi, China, Inca, Syria, Zulu dan sebagainya; yang mana sifat kekuasaannya adalah terbatas. Ini ditunjukkan bahwa otoritasnya itu tidak sama kuat antara wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan yang jauh dari pusat pemerintahan. Bentuk seperti negara imperium tradisional itu secara internal terfragmentasi, kemudian secara etnis adalah bersifat heterogen termasuk di dalamnya itu juga terdapat banyak masyarakat yang secara kultural berbeda-beda. Imperium ini diperintah melalui sebuah kekuasaan yang meluas dari pemerintahan pusat, akan tetapi kekuasaan dalam pemerintahan imperium ini tidak sama di semua area dari imperium. Semakin dekat kepada pusat maka kekuasaan semakin besar, akan tetapi semakin jauh maka kekuasaan itu semakin lemah. Pemerintahan pusat tidak mempunyai monopoli kekuasaan yang sifatnya koersif, karena memerlukan penguasaan yang bisa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lokal atau *local warlords* termasuk juga adalah kekuatan-kekuatan militer dari kelompok-kelompok suku ataupun juga para bandit. Di dalam negara imperium tradisional,

rakyat yang jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan mereka mempunyai kontak yang relatif sedikit dengan pejabat-pejabat negara imperium; terkecuali di dalam masa pembayaran pajak saja. Oleh karena itu, pemerintahan negara imperium ini tidak mampu menginterferensi ataupun mempengaruhi secara langsung dalam kehidupan ekonomi; ini adalah gambaran secara umum, meskipun ada juga beberapa pengecualian. Di dalam pemerintahan imperium itu tidak muncul satu "sense" yang pada masa sekarang ini dikenal sebagai nasionalisme. Kemudian juga batas-batas dari kekuasaan imperium tradisional ini secara internasional tidak menggambarkan batas-batas wilayah negara itu secara jelas karena tidak didefinisikan batas wilayah negara secara pasti, apakah patok, jalan, sungai dan sebagainya. Batas-batas itu secara sederhana adalah limit (batasan) dari ekspansi militer yang dapat bergerak melalui satu penaklukan. Jadi batas-batas luar adalah batas ketika kekuatan militer itu bisa digerakkan kesana dan bisa menaklukkan. Negara imperium juga tidak memiliki satu kesepakatan atau satu bentuk dari hukum dan aturan maupun hak-hak yang berlaku diantara sejumlah imperium yang ada. Dengan kata lain, tidak ada satu

sistem imperium yang sifatnya mengglobal. Apabila dibandingkan dengan sistem negara-bangsa modern, nampak bahwa negara-bangsa modern (*modern nation-state*) ini menjadi satu hasil ciptaan atau kreasi yang sifatnya unik; ditinjau dari perputaran sejarah, ekonomi, sosial dan juga politik. Negara-bangsa modern ini berbeda dengan negara kota seperti di era Yunani kuno ataupun juga imperium tradisional.

Karakteristik krusial dari negara bangsa modern adalah adanya klaim kedaulatan atas sebuah wilayah yang pasti (*claim sovereignty over fixed territory*). Kedua atribut tersebut, yaitu kedaulatan dan wilayah, itu saling berkaitan satu sama lain. Secara prinsip adalah negara-bangsa merupakan anggota dari sistem negara-bangsa secara mengglobal atau menyeluruh di seluruh dunia. Negara-bangsa ini merepresentasikan wilayah atau teritori sebagai satu ruang kosong yang diisi melalui representasi dari kekuasaan dan otoritas negara. Hal ini dilakukan melalui satu praktek pemerintahan dan juga bentuk-bentuk artifak pemerintahan ataupun model pemerintahan. Negara-bangsa ini mendifusikan dan menyatakan diri ke dalam satu identitas singular (identitas yang satu) di dalam satu ruang

yang terikat dengan garis batas yang diakui secara legal. Wilayah atau kedaulatan secara kewilayahan dari suatu negara direpresentasikan melalui sebuah ibukota negara, direpresentasikan melalui bendera, lagu kebangsaan, pasport, mata uang, kekuatan militer, museum nasional dan perpustakaan nasional, kedutaan besar di negara berdaulat yang lain dan biasanya satu kursi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada masa sekarang terdapat sekitar 203 negara bangsa yang diakui ataupun sudah eksis di dunia internasional.

BELA NEGARA SEBAGAI SEBUAH *NATION-STATES* AWARENESS

Bela negara dapat diterjemahkan bahwa segala sesuatu upaya yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup bernegara dan menjaga keberadaannya. Dengan demikian bela negara bukan semata-mata bersifat fisik namun juga non fisik. Sebagai gambaran misalnya, upaya meningkatkan harga diri bangsa dengan membangun nama baik adalah bagian dari bela negara. Upaya untuk mempertahankan negara dari segala sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan bela negara. Dalam pemahaman seperti ini, maka bela negara mempunyai dimensi yang sangat luas, dan bukan terbatas pada unsur-unsur yang sifatnya fisik misalnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang dimanifestasikan sebagai kekuatan militer maupun persenjataan.

BAB II

MASALAH-MASALAH NEGARA-BANGSA

Kesadaran bela negara didasarkan pada rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri masyarakat sebagai warga negara. Upaya bela negara selain sebuah kewajiban dasar juga sebuah dedikasi warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Bela negara adalah suatu pengabdian semua warga negara dalam setiap bentuknya untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Kesadaran bela negara adalah upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat sebuah negara dan dilandasi cinta tanah air.

BELA NEGARA DAN NASIONALISME

Persoalan sosial maupun politik berberkaitan dengan negara-bangsa adalah isu-isu penting dalam jaman modern seperti sekarang. Selain menjadi unit utama dalam analisis politik, negara (*state*) adalah entitas yang berpengaruh dalam mengendalikan masyarakat baik yang bersifat homogen maupun majemuk. Dijelaskan oleh Gellner (1983:4) bahwa:

“the state is the specialization and concentration of order maintenance. The ‘state’ is that institution or set of institutions specifically concerned with the enforcement of order (whatever else they may also be concerned with). The state exist where specialized order-enforcing agencies, such as police forces and courts, have separated out from the rest of social life. They are the state.”

Eksistensi negara ini sangat penting artinya bagi perkembangan nasionalisme sebuah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa nasionalisme mempunyai kaitan yang erat dengan negara (Gellner 1983:5). Dijelaskan oleh Breuilly (1994:1) yang mengatakan:”*nationalism is best understood as an*

especially appropriate form of political behavior in the context of the modern state and the modern state system”.

Dalam perkembangan membentuk sebuah negara-bangsa yang kuat, nasionalisme berperan penting dalam proses itu. Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai nasionalisme maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa itu. Emerson, R (1960:95) mengatakan bahwa:

“the nation is a community of people who feel they belong together in the double sense that they share deeply significant elements of a common heritage and that they have a common destiny for the future.”

Sedangkan Kellas (1991:2-3) menjelaskan sebagai berikut:

“a nation is a group of people who feel themselves to be a community bound together by ties of history, culture, and common ancestry. Nations have ‘objective’ characteristics which may include a territory, a language, a religion, or common descent (though not all of these are always presents), and ‘subjective’ characteristics, essentially a

people's awareness of its nationality and affection for it."

Uraian tersebut menjelaskan bahwa bangsa adalah sebuah komunitas masyarakat yang merasa memiliki warisan sejarah dan cita-cita masa depan yang sama. Komunitas masyarakat ini merasakan diri mereka terikat dengan hubungan sejarah, budaya dan keturunan yang sama. Sebuah bangsa mempunyai ciri-ciri objektif seperti wilayah, bahasa, agama, atau keturunan serta ciri-ciri subjektif yaitu kesadaran rakyat terhadap kebangsaannya sendiri. Adanya keinginan untuk bersatu dengan menerima identitas nasional bersama dan didorong kesamaan sejarah serta cita-cita, maka terbentuklah bangsa.

Berkaitan dengan bangsa maupun negara, Gellner menunjukkan bahwa bangsa (*nations*) dan negara (*states*) bukanlah sesuatu yang sama. Ikatan yang ada antara bangsa dengan negara sehingga mereka saling memerlukan satu sama lain adalah melalui nasionalisme. Bangsa dan negara ditentukan satu sama lain bermakna bahwa satu tanpa yang lainnya adalah tidak lengkap (1983:5-6). Sedangkan berkenaan dengan bangsa maka landasan dari nasionalisme ialah kesetiaan politik kepada bangsa dan bukan pada struktur lain seperti puak (*clan*), etnik,

negara kota ataupun imperium (Hinsley 1973: 21). Nasionalisme adalah fenomena sosial dan politik dan bagian dari obyek penyelidikan sosiologis (Smith 1971:3). Oleh karena itu nasionalisme ini juga berhubungan erat dengan sebuah identitas nasional bersama. Spencer & Wollman (2002: 2-3) mengatakan bahwa nasionalisme merupakan hasil utama daripada ide mengenai identitas nasional. Sedangkan identitas nasional adalah sebuah proses bagi seseorang maupun sekelompok orang untuk mengenal pasti diri mereka sebagai anggota dari bangsa, meskipun di antara mereka boleh jadi terdapat berbagai perbedaan yang menonjol. Uraian tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme adalah hasil dari pembentukan negara-bangsa.

Dengan demikian boleh dianggap bahwa apabila kita membicarakan eksistensi dari negara-bangsa, maka tidak dapat mengabaikan arti penting dari nasionalisme. Smith (2001:1) mengatakan bahawa fokus nasionalisme (baik sebagai ideologi, pergerakan sosial dan bahasa simbol) memerlukan pemikiran konsep-konsep yang berhubungan dengan itu seperti bangsa, identitas nasional dan negara nasional. Hasilnya ialah ruang lingkup kerja ini memerlukan kajian antar bidang

(*interdisciplinary*); khususnya adalah sejarah, sosiologi, ilmu politik, hubungan internasional dan pada tingkatan tertentu adalah antropologi. Hal ini terjadi karena sejumlah perhatian perlu diberikan pada bidang yang berkaitan dengan etnisitas, yaitu seperti identitas etnik dan komunitas; yang telah menyusun sebagian besar latar belakang sosial dan sejarah dari bangsa dan nasionalisme.

Meskipun banyak ahli yang menulis tentang nasionalisme, dalam tulisan ini secara khusus nasionalisme yang akan dibicarakan adalah daripada tulisan dari Kedourie (1961), Girardet (1965), Kohn (1969), Gellner (1983), Smith (1971, 1979), Minogue (1968), Anderson (1983), Hobsbawn (1983), Schwarzmantel (1991), Spencer & Wollman (2002) dan Breuilly (2005), yang fokus studinya tentang nasionalisme sebagai pemikiran (*state of mind*), kesahihan politik, ideologi dan pergerakan politik, nasionalisme sebagai sebuah *invented tradition* iaitu sebuah tradisi yang perlu terus ditemukan kembali, serta nasionalisme sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan (*imagined community*). Uraian di bawah ini akan

membahas mengenai studi tentang nasionalisme dalam kaitannya dengan negara dan bangsa.

NASIONALISME, NEGARA DAN BANGSA

Pada mulanya, nasionalisme ini muncul di negara-negara yang berdaulat penuh yang menggunakan modernisasi dan industrialisasi di Eropa. Kohn (1969: 4) mengatakan bahwa nasionalisme itu semula adalah tidak pernah terfikirkan (*unthinkable*) sebelum kemunculan negara-negara modern dalam tempo waktu antara abad ke-16 sampai 18. Sedangkan Kamenka, E (1973: 4) mengatakan bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang bersifat modern dan merupakan fenomena yang terjadi di Eropa pada awalnya. Sebagai gambaran terbaik munculnya nasionalisme di Eropa adalah revolusi Perancis tahun 1789. Dijelaskan juga oleh Alter, P (1989:4) yaitu bahwa landasan dari nasionalisme modern bias ditemukan di masa akhir abad ke-18 di Eropa Barat dan Amerika Utara.

Sebagai sebuah fenomena modern di negara-negara yang berdaulat, pada awalnya nasionalisme ini muncul sebagai sebuah keadaan pemikiran dan kesadaran (*awareness*) dari

anggota-anggota masyarakat suatu negara. Hal ini dijelaskan oleh Kohn (1969: 16) yang mengartikan nasionalisme sebagai:

“a state of mind, permeating the large majority of a people and claiming to permeate all its members; it recognizes the nation-state as the ideal form of political organization and the nationality as the source of all creative cultural energy and of economic well-being.”

Uraian ini menjelaskan bahawa nasionalisme adalah sebuah keadaan fikiran yang meresapi mayoritas rakyat jelata dan berupaya untuk mempengaruhi keseluruhan dari anggota-anggota masyarakat. Oleh karena itu, negara-bangsa menjadi sebuah bentuk organisasi politik yang sesuai dan nasionalisme kemudian menjadi sumber dari keseluruhan kegiatan kebudayaan dan ekonomi.

Dalam tahap perkembangan selanjutnya, kesadaran masyarakat sebuah negara menghasilkan idea-idea mengenai hubungan antara diri mereka dengan persekitarannya, terutamanya adalah dengan negara dimana mereka tinggal. Dengan demikian, menurut Kohn nasionalisme adalah sebuah ide atau daya ide yang mengisi pikiran dan hati manusia dengan

pemikiran baru dan perasaan baru, serta menjadi panduan untuk menerjemahkan sebuah kesadaran menjadi suatu perbuatan yang dinyatakan. Oleh karena itu nasionalisme menuntut (*demand*) eksistensi sebuah negara-bangsa dan eksistensi sebuah negara-bangsa akan mengokohkan nasionalisme (1969: 19-20). Hal ini menunjukkan bahwa kumpulan dari rakyat bias disatukan ke dalam sebuah bangsa dengan menggunakan semangat nasionalisme. Adanya sebuah bangsa ini memungkinkan mereka mengenal pasti diri mereka sendiri, berbudaya dengan budaya nasional, menjalani kehidupan dan berusaha untuk bertahan hidup, serta memungkinkan mereka mempertahankan kebangsaannya.

Perkembangan nasionalisme ini memerlukan peran serta seluruh rakyat di sebuah negara dan merupakan bagian dari proses politik. Hal ini dijelaskan pula oleh Kohn (1969: 4-6) yang mengatakan bahwa pertumbuhan nasionalisme adalah proses penyatuan rakyat yang begitu banyak ke dalam sebuah bentuk politik bersama (*a common political form*). Nasionalisme mensyaratkan keberadaan sebuah bentuk pemerintahan pusat atas wilayah yang luas dan jelas, baik dalam kenyataan maupun

pemikiran. Nasionalisme bukanlah fenomena alamiah, bukan pula hasil dari ciptaan undang-undang yang *eternal* ataupun *natural*; nasionalisme adalah hasil ciptaan dari perkembangan faktor-faktor sosial dan intelektual yang muncul pada tahap tertentu dalam sejarah. Sebagai contoh ditunjukkan oleh Alter, P (1989:5) iaitu bahwa dalam periode abad ke-19 dan 20 muncul beberapa negara baru yang menggunakan label nasionalisme seperti Yunani, Itali, Jerman, Cekoslowakia dan Polandia.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara sistem feodal dengan sistem negara yang menjadi syarat adanya nasionalisme. Dalam sistem feodal, kekuasaan politik dikuasai secara khusus oleh individu di dalam wilayah tertentu, yaitu raja, di mana kecintaan dan kesetiaan rakyat adalah kepada raja. Sistem feodal merujuk kepada sistem politik di Eropa pada abad pertengahan yang memperlihatkan hubungan yang saling memerlukan di antara tuan tanah (*lords*), orang biasa atau petani (*vassals*) dan tanah (*fields*). Dalam sistem ini petani bekerja dan menjadi tentara untuk melindungi seorang bangsawan dan

sebagai balasan mereka diperbolehkan memanfaatkan tanah bangsawan tersebut.¹

Dalam sistem negara kecintaan rakyat adalah kepada tanah air, yaitu, adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap negara di mana kesetiaan rakyat adalah kepada negara tersebut. Ini merupakan bentuk negara-bangsa (*nation-state*).² Dengan demikian, salah satu syarat penting agar nasionalisme itu boleh eksis adalah adanya keberadaan sebuah negara yang berdaulat terlebih dahulu. Gellner (1983: 5) menjelaskan bahwa nasionalisme tidak akan timbul dalam kondisi ketiadaan sebuah negara. Ini bukan berarti bahwa masalah nasionalisme akan selalu muncul dalam setiap negara, tetapi yang terjadi adalah bahwa masalah nasionalisme bias menjadi isu bagi sejumlah negara tertentu. Selanjutnya Gellner

¹ Pada dasarnya, sistem ini memperlihatkan hubungan pribadi yang erat antara tuan tanah dengan petani yang disyaratkan untuk memberi taat setia kepada *lord*. Satu pihak akan memberi perlindungan sementara satu pihak yang lain memberi kesetiaan ketentaraan demi keselamatan raja. Sebagai contoh adalah sistem feodal di England dan Perancis pada abad pertengahan.

² Bentuk negara kebangsaan (*nation-state*) bermakna bahwa warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu, tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan.

(1983:1) mengartikan nasionalisme sebagai teori legitimasi politik yang mana garis-garis batas etnis semestinya tidak melampaui garis-garis batas politik. Dia mengatakan seperti berikut:

“nationalism is a theory of political legitimacy, which requires that ethnic boundaries should not cut across political ones, and, in particular that ethnic boundaries within a given state –a contingency already formally excluded by the principle in its general formulation – should not separate the power-holders from the rest.”

Negara menjadi sebuah aspek yang jelas dalam pertumbuhan nasionalisme karena negara mempunyai kekuasaan dan legitimasi politik untuk mengatur dan mengendalikan rakyatnya. Menurut Gellner (1983:4) negara merupakan institusi atau susunan institusi yang secara khusus mempunyai hak dan kekuasaan untuk memaksakan peraturan kepada rakyat (*enforcement of order*). Organisasi yang khusus dari negara yang mempunyai hak dan kekuasaan tersebut, seperti kekuatan polisi dan mahkamah, telah dipisahkan dari

kehidupan sosial. Selanjutnya susunan institusi tersebut dikenali dengan sebutan negara.

Oleh itu, karena adanya keyakinan akan legitimasi politik dari negara, rakyat dan masyarakat yang menggunakan nasionalisme ini bias menerima landasan tersebut sebagai sebuah prinsip politik yang sesuai bagi mereka. Dijelaskan oleh Gellner (1983:1) yang mengatakan bahwa nasionalisme merupakan prinsip politik yang penting karena mampu mengikat unit nasional dan unit politik ke dalam kedudukan yang sesuai (*congruent*).

Berdasarkan hubungan diantara negara dengan rakyatnya tersebut maka terdapat kaitan erat antara negara dengan bangsa.³ Menurut Gellner (1983: 5-6) nasionalisme mengikat negara dan bangsa dalam arti bahwa mereka bergantung satu sama lain; yaitu eksistensi satu bagian tanpa adanya yang lain adalah tidak lengkap,⁴ apabila terjadi yang

³ Sebutan bangsa mempunyai kaitan erat dengan rakyat, seperti dijelaskan oleh Rupert Emerson (1960: 95): “*The nation is a community of people who feel they belong together in the double sense that they share deeply significant elements of a common heritage and that they have a common destiny for the future*”.

⁴ Artinya adalah kewujudan sebuah bangsa tanpa memiliki negara, ataupun sebuah negara yang tidak mempunyai identitas sebagai sebuah bangsa.

demikian, maka ini berarti sebuah kejadian yang menyedihkan (*tragedy*). Sebelum bangsa dan negara bisa mempunyai tujuan yang bersamaan, masing-masing mereka mesti eksis terlebih dahulu sedangkan kemunculannya adalah secara tersendiri serta bersifat kebetulan (*contingency*). Negara boleh jadi muncul tanpa adanya bantuan dari sebuah bangsa. Sedangkan pada bagian lain, bangsa seringkali pula eksis tanpa adanya anugerah (*blessing*) memiliki negara mereka sendiri.⁵

Nasionalisme juga merupakan sebuah ideologi atau sistem kepercayaan. Christenson et al (1981:4) mengatakan bahwa ideologi adalah sebuah susunan penting dari ide-ide⁶ (*propositions*) berkaitan dengan kehidupan alamiah manusia dan masyarakat baik bersifat normatif maupun empiris. Sebuah

⁵ Negara-negara yang berdiri tanpa adanya bantuan bangsa adalah dalam arti negara yang tidak mempunyai identitas bangsa yang khas dan homogen, ini biasanya merupakan negara majemuk yang mempunyai kepelbagaian etnik, budaya, agama dan sebagainya. Apabila mereka gagal membangun identitas nasional bersama, maka di negara-negara seperti ini seringkali terjadi pertikaian yang bisa mengakibatkan kehancuran negara. Contohnya adalah negara Yugoslavia (tidak ada sebutan bangsa Yugoslavia), yang telah mengalami perpecahan pada masa sekarang dan menjelma menjadi beberapa negara baru. Sedangkan bangsa-bangsa yang tidak mempunyai negara sendiri contohnya adalah bangsa Kurdi (bangsa Kurdi ini terdapat di negara Iraq dan juga Turki, keinginan mereka membentuk sebuah negara di Kurdistan tidak berhasil sampai sekarang).

⁶ Usul-usul ini contohnya: pembentukan aturan-aturan politik yang lebih disukai berserta strategi untuk mencapainya (misalnya dengan menggunakan institusi-institusi, proses-proses mahu pun program-program); visi-visi mengenai kehidupan masyarakat pada masa sekarang maupun masa depan, dan lain-lain.

ideologi menawarkan tafsiran dari masa lalu, masa sekarang dan tujuan di masa depan. Berkaitan dengan ideologi ini, Spencer & Wollman (2002: 2) mengatakan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang membayangkan sebuah komunitas dengan cara tertentu yaitu sebagai kebangsaan. Ditegaskan oleh Smith (1979:1) bahwa nasionalisme adalah ideologi yang penting pada masa modern, karena nasionalisme menghubungkan rancangan dari pihak komunitas tertentu dengan daya lihat (*vision*) budaya kelompok yang lebih menyeluruh.

Berkaitan dengan nasionalisme sebagai sebuah ideologi, Smith (1971: 20-21) menjelaskan bahwa ajaran utama nasionalis dibangun dari ide-ide sebagai berikut :

1. Kemanusiaan secara alamiah terbagi ke dalam bangsa-bangsa
2. Masing-masing bangsa mempunyai wataknya sendiri yang berbeda satu sama lain
3. Keseluruhan sumber dari kekuasaan politik adalah bangsa

4. Usaha mencapai kemerdekaan dan kesadaran diri dari sebuah kelompok hanya dapat berlangsung melalui sebuah bangsa
5. Eksistensi sebuah bangsa hanya dapat terpenuhi apabila bangsa tersebut mempunyai negara sendiri
6. Kesetiaan kepada negara-bangsa mengesampingkan kesetiaan-kesetiaan kepada yang lain.

Oleh karena itu, Smith (1971:1) mengatakan bahwa kedaulatan hanya dapat eksis apabila terdapat bangsa di mana kesetiaan pertama dari masyarakat adalah pada bangsa tersebut, serta bangsa itu sendiri bisa membuat undang-undang bagi warganegaranya. Smith (1971:2) menyebutkan sebuah konsep penting yaitu kebangsaan yang sempurna atau sesuai dengan yang dikehendaki (*national ideal*). Maksud konsep ini adalah kedaulatan hanya mungkin berlangsung apabila terdapat bangsa dimana kesetiaan pertama dari orang-orang adalah pada bangsa tersebut. Menurutnya dasar dari kebangsaan yang ideal itu adalah daya penilaian bahwa orang-orang secara 'sungguh-sungguh' dan 'alamiah (natural)' terbagi jelas ke dalam komunitas sejarah dan budaya yang disebut bangsa-bangsa.

Tiap-tiap bangsa adalah nyata dan tersendiri (*unique*) di mana masing-masing mempunyai sumbangan yang khas bagi keberadaan rumpun bangsa-bangsa. Setiap bangsa menjelaskan identitas dari anggota-anggotanya karena budaya khasnya adalah merujuk pada individu. Oleh yang demikian itu maka nasionalisme mempunyai kaitan dengan penilaian mengenai masa depan. Dijelaskan oleh Smith (1971: 22) sebagai berikut:

“nationalism is a vision of the future which restores to man his ‘essence’, his basic pattern of living and being, which was once his undisputed birthright... All men will be nationalists in the day when they will recognise their identity in the active enterprise of ‘love’.”

Dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang nasionalisme, keberhasilan membangun nasionalisme secara keseluruhan melibatkan beberapa hal penting. Smith (1971: 23) mengatakan bahwa nasionalisme utamanya menggabungkan tiga hal yang sempurna (*ideal*) iaitu:

1. Kesungguhan hati secara bersama-sama dari rakyat

2. Adanya ungkapan karakter nasional dan perseorangan, serta
3. Pembahagian dunia secara vertikal ke dalam bangsa-bangsa tersendiri (*unique*) yang masing-masing menyumbangkan *genius*-nya yang khas untuk cadangan kemanusiaan bersama (*common fund of humanity*).

Nasionalisme juga merujuk pada sebuah pergerakan politik yang mempengaruhi perubahan-perubahan penting yang terjadi di dunia modern. Sejarah negara-negara di dunia telah menunjukkan bahwa nasionalisme memegang peran penting dalam perjuangan politik, baik untuk memperkuat kokohnya eksistensi negara dan bangsa maupun upaya bagi melepaskan diri dari penjajahan. Breuilly (2005: 17) mengatakan bahwa nasionalisme merupakan sebuah pergerakan politik untuk mencapai dan memelihara otonomi, kesatuan, serta identitas penduduk bagi menyusun sebuah bangsa yang sebenarnya atau bangsa yang potensial. Sebagai sebuah pergerakan politik ditegaskan pula oleh Minogue (1968: 25) sebagai berikut :

“Nationalism is a political movement which seeks to attain and defend an objective we may call national integrity. It seeks “freedom”, but freedom can mean many things. The demand for freedom already carries with it the suggestion that nationalist feel themselves oppressed. Out of this freedom-oppression complex of ideas we may extract a general description of nationalism: it is a political movement depending on a feeling of collective grievance against foreigners.”

Sebagai sebuah pergerakan politik dalam sebuah negara, maka nasionalisme mempunyai keterkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam uraiannya Minogue (1968: 12-16) mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kelompok dengan sebuah nama kelompok tertentu dan nama-nama ini bisah dilihat sebagai kewarganegaraan (*nationalities*). Mereka tidak merasa sebagai rakyat sampai pada masa tertentu di mana kesadaran berbangsa timbul. Mereka lebih suka mengenali diri mereka dengan agama, ketaatan pada raja, kota, wilayah lokal, golongan ras atau warna kulit dibanding mengenali diri mereka sebagai bangsa.

Nasionalisme sebagai sebuah pergerakan politik mempunyai beberapa tahap yang utama. Minogue (1968: 26-29) menunjukkan adanya beberapa tahap nasionalisme dan masing-masing tahap secara prinsip dapat dibedakan dengan jelas :

1. Tahap pertama adalah menghidupkan semangat nasionalisme (*stirrings*). Ini adalah suatu periode ketika sebuah bangsa menjadi sadar akan dirinya sendiri dan muncul sebagai bangsa yang berusaha menghentikan penindasan.⁷
2. Tahap kedua adalah perhatian utama nasionalisme, yaitu masa perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Permulaan perjuangan itu bisa jadi mempunyai masa tertentu yang pasti, namun boleh jadi juga tidak; tetapi

⁷ Dalam konteks negara-negara yang mengalami penjajahan, ini seringkali menjadi sebuah masa untuk menentang ide-ide dan cara-cara asing dalam mengerjakan sesuatu hal tertentu. Dengan kata lain, dalam masa ini terdapat usaha untuk mencari identitas budaya milik sendiri. Sebagai contoh: agama yang sebelumnya telah tidak berdaya dalam menghalau ide-ide asing bisa jadi akan dibangkitkan kembali (dikutip dari Minogue, 1968: 26-29).

secara umum perjuangan tersebut mempunyai perhentian yang tetap (*fixed terminus*).⁸

3. Tahap ketiga disebut sebagai fase konsolidasi atau usaha memperkuat persatuan. Hampir semua negara yang berdaulat berada dalam peringkat ini. Pada masa sekarang, konsolidasi kebanyakan ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Sebuah bangsa diyakini hanya mampu melaksanakan konsolidasi dengan baik apabila mempunyai kondisi dan posisi ekonomi yang kuat.

Pembahasan mengenai nasionalisme juga dilakukan oleh Hobsbawn, Eric.J (1983) yang berpendapat bahwa sebuah bangsa itu lahir karena ditemukan dan nasionalisme adalah sebuah *invented tradition*, sebuah tradisi yang perlu terus dirangkai kembali. Hobsbawm mengatakan bahwa nasionalisme sebuah negara merupakan proses yang tak pernah berhenti, ia bisa terus dirangkai dan dikembangkan sesuai dengan keperluan masa sekarang. Hobsbawn (1983:1) mengatakan:

⁸ Sebagai contoh, negara Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, maka tahun 1945 itu menjadi sebuah *fixed terminus* ketika pencapaian kedaulatan kemerdekaan dan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diperoleh.

“Invented tradition’ is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity with the past. In fact, where possible, they normally attempt to establish continuity with a suitable historic past.”

Tradisi diciptakan oleh tokoh-tokoh atau suatu kelompok sosial untuk berbagai tujuan. Bentuk-bentuk ciptaan dari tradisi ini diterima oleh warga masyarakat karena dilakukan dengan mempertahankan simbol-simbol tradisi yang berkaitan dengan sejarah masa lampau. Ciptaan tradisi ini selain diterima oleh warga masyarakat pendukungnya juga dipraktikkan secara terus menerus dalam bentuk aktivitas sosial sehingga menjadi semacam ritualisasi yang berlangsung secara wajar.

Sedangkan Anderson, B (1983) mengatakan bahwa nasionalisme sebuah bangsa adalah sebuah ide tentang komunitas yang dibayangkan (*an imagined communities*). Anderson (1983:6) menjelaskan sebagai berikut:

“It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion.”

Anderson (1983:7) menjelaskan lebih lanjut:

“Finally, it is imagined as a community, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of people, not so much as to kill, as willing to die for such limited imaginings.”

Uraian tersebut menjelaskan bahwa nasionalisme sebuah bangsa itu dibayangkan (*imagined*) karena setiap anggota dari sebuah bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekali pun, tidak mengenal seluruh anggota masyarakat atau rakyat dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup berdasarkan bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di dalam pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Sebuah bangsa

dan rasa nasionalisme menjadi suatu yang '*imagined*', yang berarti orang-orang mengenal pasti diri mereka sebagai warga suatu bangsa meskipun tidak pernah saling mengenal, berjumpa, atau bahkan mendengar; tetapi dalam pikiran mereka hidup suatu bayangan (*image*) mengenai kesatuan bersama. Itulah sebabnya ada warga negara yang mau mengorbankan jiwa dan raganya demi membela bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makna nasionalisme adalah sebagai keadaan fikiran dan kesadaran, legitimasi politik, ideologi, pergerakan politik, penemuan tradisi kembali serta sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan. Bagian selanjutnya akan membicarakan mengenai perdebatan-perdebatan tentang nasionalisme dalam konteks apakah nasionalisme itu lebih bersifat destruktif ataukah lebih bersifat konstruktif bagi perkembangan kehidupan dunia.

PERDEBATAN-PERDEBATAN MENGENAI NASIONALISME

Dalam satu bagian, nasionalisme dianggap telah membawa akibat yang destruktif bagi kehidupan manusia. Keberadaan nasionalisme menghasilkan anggapan bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang tidak baik (*negative*) yaitu manifestasi sebuah ideologi yang ekstrem ditinjau daripada aspek-aspek moral.⁹ Nasionalisme menggambarkan sebuah bentuk keinginan bersama dan sikap penceroohan secara angkuh dengan menggunakan label bangsa (Peter Alter 1989: 6). Sedangkan Christenson (et al) (1981:38) mengatakan bahwa peranan negatif nasionalisme telah nampak jelas. Di dalam teori maupun praktiknya nasionalisme telah menjadi manifestasi dari bentuk-bentuk tindakan untuk mewujudkan sebuah dunia yang sempurna,¹⁰ perluasan wilayah negara, penjajahan ke atas wilayah yang luas atau imperialisme, serta perang.

⁹ Sebuah ensiklopedia Jerman mendefinisikan nasionalisme, dalam kaitannya dengan sebuah bangsa, sebagai sebuah bentuk pemikiran yang dilebih-lebihkan (*exaggerated*) dan tidak mempunyai sifat toleransi (Grober Brockhaus, 16th ed., Wiesbaden 1955, entry 'Nationalismus', dikutip dari Alter, 1989: 6).

¹⁰ Diikenali dengan istilah *messianism*, sebagai contoh adalah nasionalisme negara-negara Barat yang berupaya menjadikan negara-negara lain untuk berada dalam kedudukan yang sama dengan Barat. Ini mempunyai arti bahawa negara-negara Barat menganggap negara-negara lain (terutama negara-negara Timur) sebagai pihak yang kedudukannya lebih rendah, oleh itu mereka mesti menjadikan seperti Barat, sebagai bentuk ideal yang patut dicontoh.

Nasionalisme yang membawa akibat yang destruktif ini menyebabkan munculnya kritikan terhadap nasionalisme. Sejumlah kritik terhadap nasionalisme telah pula banyak diberikan, antara lain seperti yang dilakukan oleh Lord Acton (1862)¹¹ yang mengecam nasionalisme sebagai sebuah langkah mundur dalam sejarah. Acton (1862: 193) juga mengatakan bahawa:

“The principle of nationalism would lead to the oppression of ethnic minorities. The dominant group within a state could not admit them to a position of equality without contradicting the principle, so they would inevitably be ‘exterminated or reduced to servitude, or outlawed, or put in a condition of dependence’.”

Kritik juga dilakukan oleh Elie Kedourie (1961) yang mengatakan bahawa nasionalisme sebagai sebuah bentuk yang ideal adalah sesuatu yang menipu. Hal ini kerana nasionalisme telah menyebabkan munculnya banyak keganasan, revolusi dan

¹¹ Tulisan Acton dengan tajuk *‘Nationality’* yang pertama kali diterbitkan tahun 1862, dikutip dari Birch (1989: 26-28).

perang, serta tidak mempunyai tujuan yang bernilai baik. Kedourie (1961: 138) lebih lanjut menjelaskan seperti berikut :

“The attempt to refashion so much of the world on national lines has not led to greater peace and stability. On the contrary, it has created new conflicts, exacerbated tensions, and brought catastrophe to numberless people innocent of all politics.”

Kritikan yang lain dilakukan oleh Schwarzmantel (1991:16-17), yaitu bahwa politik dengan menggunakan nasionalisme yang berasaskan harapan kepada bangsa telah dibuat bagi tujuan akhir politik yang sangat berbeda.¹² Dicontohkan bahwa pergerakan anti kerajaan telah menjadikan nasionalisme sebagai pengharapan utama (*central appeal*) mereka dengan menggunakan sikap anti demokrasi, yang dalam kasus Nazisme di Jerman, yaitu dengan menggunakan konsepsi rasis dari bangsa. Oleh yang demikian, nasionalisme menurut Schwarzmantel (1991:23) menyebabkan seorang nasionalis

¹² Artinya adalah tujuan akhir politik yang sangat berbeaa dengan konsep nasionalisme secara ideal seperti ditunjukkan Smith (1971: 2) mengenai *national ideal*.

memandang bangsanya sendiri sebagai pusat dunia, dan di bagian lain bangsa-bangsa yang berbeda dianggap tidak mempunyai nilai (*value*) setara atau kedudukannya lebih rendah.¹³

Seorang ahli ilmu politik dari Perancis iaitu Raoul Girardet (1965:430) ¹⁴ mengatakan bahwa nasionalisme sebagai persoalan utama bagi mempertahankan kemerdekaan dan mendeklarasikan keunggulan sebuah negara-bangsa. Dalam kedua situasi nasionalisme, yaitu sebagai perasaan moral dan ideologi maka nasionalisme ini melibatkan pujian dan sanjungan kepada perasaan kebangsaan. Uraian dari Girardet ini menunjukkan sebuah negara-bangsa cenderung untuk melebih-lebihkan kedudukan bangsanya sendiri dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh yang demikian Schwarzmantel (1991:49)

¹³ Dicontohkan oleh Schwarzmantel (1991:23) yaitu: Jerman pada masa Nazism beranggapan sebagai sebuah bangsa yang sebenarnya (*a true Volk*) dan hanya mereka yang telah menjaga bahasanya dari pelbagai pencemaran atau kontaminasi; Perancis, setelah Revolusi Perancis 1769, beranggapan bahawa mereka adalah pihak yang sebenarnya dalam membawa nilai-nilai Kristian dan nilai-nilai klasik, serta bangsa-bangsa lain dipandang lebih rendah kedudukannya.

¹⁴ R. Girardet.1965. *'Autour de l'ideologie nationalite. Perspectives de recherche*, dikutip dari Schwarzmantel (1991: 30)

mengatakan bahwa nasionalisme dianggap bersifat agresif dan merupakan bentuk perluasan wilayah berdasarkan imperialisme. Menurutnya nasionalisme ini bukanlah sebuah persoalan yang berkaitan dengan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa, tetapi merupakan bentuk dari kolonialisme dan persaingan diantara bangsa-bangsa. Sebagai contoh dapat ditunjukkan disini yaitu nasionalisme di Jerman, Itali, Inggris yang telah menyebabkan kolonialisme di sebagian besar kawasan di dunia, serta pada periode yang sama diantara kekuatan-kekuatan kelompok negara penjajah tersebut juga terjadi persaingan di antara mereka.

Uraian-uraian tersebut telah menunjukkan bahwa nasionalisme mempunyai sifat yang destruktif bagi kehidupan dunia. Kritikan-kritikan terhadap nasionalisme sebagai sebab perang dan konflik telah banyak didukung oleh bukti-bukti sejarah. Dalam politik internasional sejak Revolusi Perancis 1769 hingga zaman modern di abad-21 sekarang, banyak terjadi perang dan konflik yang melibatkan nasionalisme dan perasaan anti kebangsaan lain. Sebagai contoh adalah terjadinya Perang Dunia I, dalam masa Perang Dunia II, masa Perang Dingin tahun

1945-1989, dan konflik diantara bangsa-bangsa setelah Perang Dingin 1989 hingga sekarang.¹⁵

Pendapat-pendapat yang lain mengatakan bahwa nasionalisme hingga masa sekarang telah membawa akibat yang konstruktif dan menguntungkan. Christenson et al (1991: 38) mengatakan bahwa jenis-jenis rumusan dan tingkatan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai dan perasaan kerakyatan. Nasionalisme memainkan peranan positif dalam menyatukan rakyat dan kelompok, memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan, keselamatan, kesejahteraan dan pendidikan nasional.

¹⁵ Perang Dunia I dan II disebabkan oleh persaingan diantara negara-negara besar serta adanya pengamalan nasionalisme ekstrem (dikenali dengan *chauvinism* yaitu perasaan mengunggulkan bangsa sendiri dibanding bangsa-bangsa lain). Ini yang terjadi atas negara Jerman, Italia dan Jepang sebagai pihak utama yang telah mencetuskan perang. Masa Perang Dingin merupakan bentuk nasionalisme sebagai gerakan *messianism*, yaitu negara-negara Barat yang demokratik-liberal berupaya menyebarkan fahamnya tersebut ke seluruh dunia dan berbenturan dengan kelompok negara sosialis-komunis. Sedangkan dalam konflik sesudah Perang Dingin 1989 hingga sekarang, nasionalisme menyebabkan perang dan konflik terutama dalam bentuk persaingan kekuasaan negara-negara besar, konflik kewilayahan, serta konflik karena etnonasionalisme (lihat Cottam&Cottam 2001: 242-278; Brown, M.E et al (penyt): 1997)

Oleh yang demikian banyak ahli ilmu sosial; seperti Hertz (1966), Smith (1971, 1979), Minogue (1968), Breuilly (2005), Hobsbawm (1983) dan Benedict Anderson (1983); beranggapan bahwa nasionalisme telah memberikan dukungan yang konstruktif di dalam kehidupan manusia. Pendapat yang demikian merupakan mayoritas di dalam studi akademik para ahli ilmu sosial (Birch 1989: 34). Sumbangan-sumbangan nasionalisme antara lain bahwa nasionalisme bias menjadi alat bagi persatuan politik, serta mampu memberikan perlindungan kepada identitas budaya masyarakat dalam sebuah negara tertentu. Alter (1989: 9) mengatakan bahwa nasionalisme digunakan sebagai prinsip yang tegas untuk menghasilkan harapan-harapan, emosi-emosi dan tindakan masyarakat. Nasionalisme menjadi alat untuk membentuk perpaduan politik demi mencapai tujuan-tujuan bersama. Plamenatz (1973:24) mengatakan bahwa nasionalisme adalah hasrat untuk melindungi atau meninggikan sifat kebangsaan rakyat atau identitas budayanya ketika identitas tersebut terancam.¹⁶ Di

¹⁶ Ini banyak terjadi di negara-negara yang mengalami penjajahan dimana mereka berupaya mempertahankan identitasnya dari pengaruh asing yang dibawa penjajah. Nasionalisme yang terjadi di Syria, Irak, Libya, Tunisia boleh dijadikan contoh untuk

bagian lain nasionalisme bahkan menjadi sebuah keinginan untuk mengubah bentuk dan menciptakan identitas budaya yang baru apabila identitas yang ada dipandang tidak mencukupi (*inadequate*). Sebagai contoh di sini adalah negara Amerika Serikat.¹⁷

Dalam perkembangan sekarang nasionalisme telah terbukti berhasil dalam membangun tata dunia yang maju dan bermartabat; yang bermakna bahwa setiap bangsa dan negara sadar bahwa mereka tidak mungkin hidup sendiri tanpa ketergantungan satu sama lain. Di dalam studinya Birch (1989: 221) mengatakan bahwa nasionalisme yang muncul sebagai ideologi, dimulai sejak Revolusi Perancis 1789, telah terbukti sukses menjadi sebuah ideologi dunia pada masa modern ini. Eksistensi dari imperium dan organisasi politik sebelum kebangsaan (*pre-national*)¹⁸ telah berakhir pada masa sekarang.

hal ini. Identitas budaya mereka yang berasaskan Islam menjadi terancam karena pengaruh asing yang dibawa penjajah.

¹⁷ Amerika Serikat adalah contoh klasik mengenai negara-bangsa yang mempunyai kepelbagaian dalam hal etnik, agama dan rasial yang berupaya menghasilkan budaya Amerika yang unik dan bersifat tersendiri (lihat Cottam & Cottam 2001: 71-83).

¹⁸ Yaitu masyarakat politik sebelum masa modern, seperti kewujudan pelbagai etnik dalam sebuah kawasan dimana mereka tidak mempunyai negara tertentu atau tidak berada di bawah kekuasaan pemerintahan negara tertentu. Ini banyak terdapat di wilayah-wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, maupun kepulauan-kepulauan tertentu dimana kewujudan negara belum ada.

Dunia internasional telah terbagi kedalam berbagai negara-bangsa di mana kemerdekaan dan kesamaan kedudukan mereka diakui melalui hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB). Dengan kata lain, nasionalisme yang menjadi dasar terbentuknya sistem negara-bangsa telah muncul sebagai pemenang (*triumphed*). Sejumlah bukti menegaskan bahwa sistem negara-bangsa telah membawa keuntungan besar bagi kehidupan manusia.

Pertama, dan yang paling utama, bahwa negara-bangsa telah memberikan kepuasan pada rakyat karena mereka diperintah oleh pemimpin politik mereka sendiri dan bukan oleh orang asing.

Kedua, negara-bangsa telah memberikan rasa aman pada rakyat berkaitan dengan identitas, status dan kebanggaan mereka.

Ketiga, negara-bangsa memberikan keuntungan yang besar karena menghasilkan sebuah pemerintahan yang mempunyai hak mengatur politik sendiri. Dalam kajiannya ini Birch (1989:77-214) memberikan contoh peranan nasionalisme di United Kingdom, Kanada dan Australia.

Dengan demikian, nasionalisme mempunyai keunggulan dibandingkan sistem kepercayaan (ideologi) yang lain. Hertz (1966: 1-2) mengatakan bahwa nasionalisme telah membuktikan lebih powerful dibandingkan dengan apa-apa juga kepercayaan lain.¹⁹ Nasionalisme bukanlah bentuk intervensi ataupun invasi kepada pihak lain tetapi nasionalisme adalah penghormatan pada diri sendiri dan penghormatan kepada pihak-pihak lain. Kekuatan dari nasionalisme ini ditunjukkan oleh Hertz yaitu bahwa nasionalisme berarti kecintaan rakyat yang menyala-nyala, bersifat teguh hati, perlawanan yang gigih untuk mencapai kepentingannya yang benar, perlindungan terhadap invasi dan tipu daya asing, usaha menjaga bahasa kebangsaan, peradaban, tradisi, adat kebiasaan, penekanan pada kesatuan nasional dan persatuan, adanya pengurangan kepentingan tertentu demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Hal-hal ini adalah kekuatan yang hebat (1966: 4).

¹⁹ Misalnya sosialisme ataupun komunisme yang berlandaskan pada konflik antar lapisan (*class conflict*) dan mendasarkan pada internasionalisme.

Nasionalisme juga memberikan dukungan penting bagi usaha-usaha untuk mengakhiri penjajahan. Nasionalisme yang awalnya adalah fenomena negara-negara di Eropa, dalam tahap selanjutnya telah menyebar ke seluruh dunia. Minogue (1968:21) mengatakan bahwa nasionalisme telah menyebar ke seluruh bagian dunia, yaitu di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Sebagai sebuah ideologi dan pergerakan sosial politik, nasionalisme telah sukses menghasilkan konsensus nasional di berbagai wilayah, terutama di wilayah negara jajahan. Dalam tahap selanjutnya nasionalisme ini menjadi alat perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan. Alter (1989: 143) menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia II berakhir, pembebasan rakyat jajahan dari kekuasaan negara-negara Eropa muncul karena adanya inspirasi bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib politiknya sendiri.

Negara-negara baru yang mendapatkan kemerdekaan itu seringkali digolongkan sebagai negara Dunia Ketiga²⁰ atau

²⁰ Negara Dunia Ketiga (*Third World*) adalah sebutan bagi negara-negara yang sedang membangun, maupun negara-negara yang baru merdeka. Sebutan ini menunjukkan wujudnya negara yang masih belum maju dibandingkan negara-negara Barat dan negara-negara industri lain yang modern. Dianggap sebagai negara belum maju terutama ditinjau dari segi pembangunan negara yang belum merata, pertumbuhan

negara yang sedang membangun. Alter (1989: 146) selanjutnya menjelaskan:

“The role nationalism currently plays in Third World countries is thus to consolidate the state and sustain the process of nation-building. National ideology serves to integrate heterogeneous social, religious and ethnic groups, and to segregate them from outsiders beyond the state’s borders, even though they rarely share national characteristics in the conventional sense of the term.”

Dari uraian-uraian tersebut, nasionalisme bisa dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi yang destruktif dan sisi yang konstruktif. Dalam studi mengenai bela negara ini perspektif yang digunakan adalah pandangan yang melihat bahwa nasionalisme adalah bersifat konstruktif. Secara lebih khusus lagi adalah peranan positif nasionalisme di negara-negara sedang berkembang. Dalam kes kajian tentang nasionalisme di Indonesia maka penyelidik menggunakan konsep nasionalisme seperti diuraikan oleh Hertz (1966), Smith (1971, 1979),

ekonomi yang rendah, juga masih rendahnya kesejahteraan masyarakat, tingkat kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Minogue (1968), Anderson (1983), Hobsbawm (1983) dan Breuilly (2005), yaitu nasionalisme sebagai ideologi, pergerakan politik, merungkaikan tradisi kembali dan komuniti yang dibayangkan.

BAB III

BELA NEGARA DARI PERSPEKTIF INTEGRASI

Bagian ini akan membicarakan mengenai bela negara ditinjau dari konsep integrasi dalam kaitannya dengan bangsa. Masalah perpaduan di dalam bangsa yang mempunyai kepelbagaian etnis serta struktur masyarakat majemuk yang memerlukan keseimbangan (*equilibrium*) di antara struktur sosial, politik dan budayanya. Hal ini bermakna bahwa integrasi adalah proses yang memerlukan konsensus sosial dan politik di antara berbagai etnis yang ada di sebuah negara.

BELA NEGARA DARI PERSPEKTIF INTEGRASI

Oleh yang demikian, sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai integrasi nasional maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai integrasi politik. Jacob & Teune (1964: 4-5)

mengatakan bahawa integrasi politik adalah hubungan di antara rakyat dalam entitas politik yang sama. Rakyat mempunyai ikatan satu sama lain dan selanjutnya memberi suatu perasaan identitas dan kesadaran diri bersama. Integrasi oleh karena itu beraskan pada ikatan yang kuat (*strong cohesiveness*) dalam sebuah kelompok sosial. Dikaitkan dengan politik, maka integrasi politik adalah sebuah keadaan ikatan diantara berbagai unsur politik dan pemerintahan. Kecenderungan ikatan secara politik akan berlaku apabila unit politik bertindak melalui alat pemerintahannya serta menerima kebijakan-kebijakan umum yang memberi hak penggunaan sumber daya komunitas yang bertujuan bagi kepentingan umum.

KONSEP INTEGRASI NASIONAL

Secara am integrasi berkaitan dengan penyatuan bagian-bagian ke dalam satu kessatuan. Morrison (1972:385) mengatakan sebagai berikut:

“Integration is a process by which members of a social system (citizens for our purpose) develop linkages and cohesion so that the boundaries of the system persist over

time and the boundaries of subsystems become less consequential in affecting behavior. In this process , members of the social system develop an escalating sequence of contact, cooperation, consensus, and community.”

Sedangkan Weiner (1968:16: 551-562) mengatakan bahwa istilah integrasi secara luas digunakan untuk merangkumi susunan yang sangat besar dari gejala politik. Weiner mendefinisikan integrasi sebagai proses yang melibatkan berbagai kelompok sosial maupun budaya yang diarahkan ke dalam satu unit kewilayahan dan selanjutnya menegakkan sebuah identitas nasional. Oleh karena itu integrasi berhubungan erat dengan penguasaan pemerintahan pusat yang mengatur unit-unit politik lokal yang ada di bawahnya, serta mengatur wilayah yang mempunyai kelompok sosial dan budaya yang berbeda-beda. Dengan perkataan lain bahwa integrasi menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pihak yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Hayward (1971: 324) ada dua indikator integrasi yang penting yaitu :

1. Pertama, adalah tingkah laku individu dalam menyesuaikan dirinya pada aturan dan ketentuan struktur politik;
2. kedua, yaitu usaha individu dalam mengenal pasti diri mereka terhadap struktur, dalam arti apakah mereka merasa perlu untuk menyesuaikan diri ataukah tidak terhadap permintaan (*demands*) yang dibuat atas nama struktur itu.

Weiner (1968: 551-553) mengatakan bahwa integrasi berkaitan dengan usaha menyatukan perbedaan demi membangun sebuah kesadaran kebangsaan, integrasi unit-unit politik ke dalam sebuah wilayah bersama dan adanya kekuasaan dari pemerintahan, integrasi antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah, integrasi warganegara ke dalam proses politik bersama, serta integrasi individu ke dalam organisasi. Ini berarti adanya keterkaitan antara masyarakat dengan sistem politik bersama-sama. Weiner (1968: 562) membagi bentuk-bentuk integrasi yaitu integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai (*value*), integrasi golongan-massa, serta tingkah laku integratif. Di dalam negara-negara yang sedang

membangun terdapat banyak masalah integrasi dimana masyarakat dan sistem politik yang ada dapat menjadi saling berjauhan (*fall apart*).

Integrasi memerlukan keterlibatan anggota-anggota masyarakat untuk bersedia berbagi (*share*) satu sama lain. Berkaitan dengan hal tersebut. Hanssen (1977: 348-349) mengatakan seperti berikut :

“I define integration as a certain frequency of communication or exchange of things, ideas, values, and / or knowledge between people... It is natural that there should be a high degree of integration between individuals who live in close proximity to each other.”

Dari uraian ini pengertian integrasi adalah frekuensi komunikasi atau pertukaran barang-barang, ide-ide, nilai-nilai, dan/atau pengetahuan dari rakyat. Terdapat tingkatan integrasi yang tinggi di antara individu-individu yang hidup berdekatan antara satu sama lain. Integrasi di antara anggota masyarakat ini didukung oleh seringnya komunikasi dan interaksi sosial yang

berlangsung diantara mereka. Selanjutnya Hanssen (1977: 4: 345-417) membagi jenis integrasi menjadi tiga jenis iaitu:

1. Integrasi horizontal, yaitu memahami integrasi secara ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda-beda, serta menempatkan berbagai masyarakat dalam kedudukan yang sama (*equal*) dan sejajar.
2. Integrasi vertikal, yaitu memahami integrasi masyarakat akibat adanya susunan tingkatan kedudukan sosial. Ini muncul ketika komunikasi ditempatkan diantara masyarakat yang mempunyai hubungan atasan dan bawahan (*superiority and inferiority*) seperti orang tua-anak, tua-muda, pemilik penguasa-awam, orang kaya-orang miskin dan majikan-pekerja.
3. Integrasi sejarah, yaitu memahami integrasi masyarakat dari adanya pengaruh tradisi dan ingatan masa lalu. Ini adalah bagian yang khas dari integrasi vertikal dan menggambarkan komunikasi internal antara pengalaman aktual (*actual*) dan ingatan dalam pikiran manusia.

Proses integrasi nasional memerlukan usaha dan langkah-langkah penting sehingga hasil yang diharapkan dapat

terjadi. Birch (1989: 9-10) menjelaskan langkah-langkah penting bagi menghasilkan integrasi antara lain sebagai berikut: membuat simbol-simbol identitas nasional seperti pemimpin negara (misalnya presiden, raja, sultan), bendera dan lagu kebangsaan; pendirian institusi politik nasional yang menempatkan warga negara di bawah undang-undang yang sama, serta institusi itu bersifat mewakili seluruh masyarakat; mewujudkan sistem pendidikan yang konstruktif bagi membentuk perasaan identitas nasional dan mengajarkan sejarah yang mereka miliki bersama; yang selanjutnya mengokohkan patriotisme baik secara langsung maupun tidak; serta adanya pembangunan rasa kebanggaan nasional.

Kenyataan menunjukkan bahwa integrasi sebuah bangsa bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan; apalagi di dalam bangsa yang mempunyai kepelbagaian etnis dan sistem budayanya majemuk. Birch (1989: 10) mengatakan bahwa hambatan utama bagi pembangunan integrasi nasional adalah eksistensi dari minoritas etnis maupun budaya dalam negara, yang menentang kecenderungan yang bersifat mempersatukan. Oleh yang demikian, integrasi minoritas ke dalam komunitas

nasional yang lebih besar adalah sangat diperlukan. Usaha melaksanakan integrasi minoritas budaya dapat berlangsung melalui dua jenis proses yaitu, pertama, tidak dirancang (*unplanned*) dan, kedua, sebagai hasil dari keputusan yang disengaja (*deliberate decisions*). Proses tidak dirancang ini umumnya dikenali sebagai pergerakan sosial sebagai akibat dari industrialisasi. Sedangkan tindakan terancang untuk melaksanakan integrasi minoritas budaya lazimnya dimulai dengan pengambilan (*adoption*) satu bahasa rasmi bagi politik, hukum dan perjanjian perdagangan komersial. Dalam tahap selanjutnya, adanya bahasa rasmi akan mendorong golongan minoritas untuk berkomunikasi dalam bahasa mayoritas, serta di bagian lain menggalakkan upaya anggota-anggota minoritas untuk menjadi fasih dalam bahasa ini. Bahasa rasmi ini cepat menjadi bahasa yang dikuasai di antara anggota minoritas yang terdidik.

Birch (1989: 36-37) menjelaskan pula bahawa integrasi nasional sebagian merupakan hasil dari pembangunan sosial dan ekonomi, serta sebagian lain adalah hasil dari kebijakan

(*policy*) yang disengaja oleh pemerintah. Komponen lain dari integrasi nasional terdiri dari kebijakan-kebijakan (*policies*) yang direka bentuk untuk mengubah sikap dan kesetiaan rakyat. Kebijakan ini didukung adanya pembangunan institusi dan kaidah sosialisasi politik. Usaha ini dibuat untuk menggantikan kesetiaan lokal dari masyarakat yang semula menolak perasaan kesetiaan nasional. Proses ini dikenal sebagai pembangunan bangsa (*nation-building*).

Terdapat faktor-faktor penting berkaitan dengan keberhasilan langkah-langkah integrasi nasional. Dawa Norbu (1992 :53) mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang eksis pada masa sekarang merupakan hasil dari integrasi sosial yang terpendam (*latent*), termasuk juga dalam masyarakat yang majemuk, melalui proses politisasi menuju ke arah kemajuan dan integrasi. Norbu (1992: 56) menyebutkan faktor-faktor penting persatuan nasional dengan menggunakan kategori sosiologi yaitu :

- 1) sistem nilai antara lain agama, budaya, tradisi, moral, kesusateraan, keyakinan beragama dan ideologi;

2) bagian pekerja yaitu pekerjaan, gaya hidup, cara hidup, kepentingan ekonomi, ikatan ekonomi dan lain-lain;

3) sosialisasi yaitu bahasa sebagai alat perhubungan, pendidikan, kebiasaan sosial dan adat kebiasaan. Termasuk juga di sini adalah institusi politik, organisasi pemerintahan, entitas politik, otonomi, pemerintahan sendiri dan juga negara. Terdapat unsur-unsur lain yang berperan secara tidak langsung bagi proses integrasi sebuah negara. Unsur-unsur itu antara lain: kewilayahan, kawasan lokal, daerah dan tempat kedudukan; sejarah, pengalaman sejarah, latar belakang sejarah, adanya pahlawan-pahlawan bangsa; serta modernitas dan industrialisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alter, Peter.1989. *Nationalism*, New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc.

Anderson, Benedict.1983. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*, London:Verso.

Aslaksen, Erik.W.,2018.*The Social Bond How the Interaction Between Individuals Drives the Evolution of Society*, Springer International Publishing AG: Switzerland

B. Hanssen. 1977. Integration processes in complex societies, p 345-417, chapter 4, dalam Bernardo Bernardi (ed),1977, *The Concept and Dynamics of Culture*, Chicago: Mouton Publishers.
Birch, Anthony H. 1989. *Nationalism and national integration*, London: Unwin Hyman Ltd

Brass, Paul. R.1991. *Ethnicity and nationalism:theory and comparison*, New Delhi: Sage publications.

Breuilly, J. 2005. Dating the nation: how old is an old nation?, dalam Ichijo, Atsuko & Uzelac, Gordana(eds), *When is the nation? Toward an understanding of theories of nationalism*, New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Brown, David.2000. *Contemporary nationalism: civic, ethnocultural and multicultural politics*, London: Routledge 11 New Fetter Lane.

Cottam, M. L. & Cottam, R. W. 2001. *Nationalism and politics: the political behavior of nation states*, Lynne Rienner Publishers,

Inc.,Colorado.

Delanty, Gerard and O'Mahony, Patrick.2002. *Nationalism and social theory*,London:SAGE Publication Ltd.

Deutsch, Karl. W. 1971. Nation building and national development: some issues for political research, 1-16, dlm, Deutsch, Karl W. and William J. Foltz (eds), *Nation Building*, Aldine-Atherton Press.

Durkheim, Emile.1984.*The Division of Labour in Society*, The Macmillan Press Ltd: London.

Elliot, Anthony.,2011. Routledge Handbook of Identity Studies, London: Routledge, p 366.

Emerson, Rupert .1960. *From empire to Nation*, Boston: Beacon.

F.H Hinsley. 1973. *Nationalism and the international system*, Oceana Publications Inc., New York: Dobbs Ferry.

Frederick L. Coolidge and Thomas Wynn. 2009. *The Rise of Homo sapiens The Evolution of Modern Thinking*, A John Wiley & Sons, Ltd. Publication: The Atrium United Kingdom.

Girardet, Raoul.1965. '*Autour de l'ideologie nationalite. Perspectives de recherche*, dlm, Schwarzmantel, John,1991. *Socialism and the Idea of the Nation*, London: Harvester Wheatsheaf.

Henry, Jane.(2007). Positive Psychology and the Development of Well-Being, pp 25-40, chapter in book, Haworth, John and Hart, Graham. (eds).2007. *Well-Being Individual, Community and Social Perspectives*, PALGRAVE MacMillan: New York.

Hertz, Frederick.1966. *Nationality in history and politics: a psychology and Sociology of national sentiment and nationalism*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd, London.

Kamenka, Eugene. 1973. Political Nationalism-The Evolution of the Idea, hal 1-20, dlm Kamenka, Eugene (ed). 1973. *Nationalism*, Canberra: Australian National University Press .

Kedourie, Elie. 1961. *Nationalism*, London: Hutchinson.

Kohn, Hans. 1969. *The idea of nationalism: a study in its origins and background*, Toronto, Ontario: The Macmillan Company Collier-Macmillan Canada Ltd..

Loomis, Charles P., 1960. *Social Systems Essays on Their Persistence and Change*, New York : D. Van Nostrand Company, Inc.

McAuley, James.W., 2003. *An Introduction to Politics, State and Society*, SAGE Publications: London

Minogue, Kenneth R (1967), *Nationalism*, London: B.T Batsford Ltd

Norbu, Dawa. 1992. *Culture and the politics of Third World nationalism*. London: Routledge 11 New Fetter Lane.

Opello, Jr. Walter C. & Rosow , Stephen J., 1999. *The Nation-State and Global Order A Historical Introduction to Contemporary Politics*, Lynne Rienner Publishers : Boulder Colorado.

Plamenatz, John. 1973. Two types of Nationalism, pp 22-36, dlm, Kamenka, Eugene (ed). 1973. *Nationalism*, Canberra: Australian National University Press.

Schwarzmantel, John, 1991. *Socialism and the Idea of the Nation*, London: Harvester Wheatsheaf.

Smith, Anthony D. 1971, *Theories of nationalism*, London: Gerald Duckworth & Company Limited.

Smith, Anthony D, 1979, *Nationalism in the twentieth century*, Oxford: Martin Robertson & Co. Ltd., 108 Cowley Road.

Smith, Anthony D, 2001, *Nationalism: theory, ideology, history*, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Spencer, P, and Wollman, H. 2002. *Nationalism: a critical introduction*, London: Sage Publication Ltd.

Weiner, Myron. 1968. Problem of integration and modernization breakdowns: political integration and political development, chapter 16: 551-562. dalam buku Jason L. Finkle and Richard W Gable, 1968, *Political development and social change*, New York: John Wiley and Sons, Inc.

ISBN 978-623-5539-75-1



9 786235 539751